

Jurnal Ilmiah

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM KERJASAMA PARIWISATA DENGAN TURKI ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penulis : Muhammad Fahdio Rachman

ABSTRAK

Republik Indonesia dan Republik Turki telah menyepakati kerjasama dalam bidang Pariwisata pada 6 Oktober 1993 yang di tanda tangani dalam MoU (Nota Kesepahaman) dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali. MoU tersebut ditanda tangani oleh kedua negara yang diwakili oleh Joop Ave sebagai Menteri Pariwisata Indonesia dan Abdul Kadir Ates sebagai Menteri Pariwisata Turki.

Kerjasama tersebut kembali diperpanjang hingga tahun dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden ke 6 Republik Indonesia. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah Indonesia gencar melakukan diplomasi budaya nya ke Negara Transkontinental tersebut guna mencapai kepentingan yaitu meningkatkan sektor pariwisata internasional Indonesia.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori konsep, yang pertama adalah Diplomasi Kebudayaan, konsep ini digunakan untuk mengetahui bentuk dari soft diplomacy yang dilakukan Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti mengadakan promosi, eksebisi hingga kompetisi guna membuktikan kualitas Indonesia kepada Turki dan dunia internasional. Konsep kedua menggunakan konsep Implementasi Kebijakan yang digunakan untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh kedua negara guna menyesuaikan perjanjian yang telah disetujui dalam MoU kerjasama pariwisata tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah ditulis oleh penulis dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius untuk meningkatkan sektor pariwisata nasional melalui kerjasama dengan Republik Turki. Pasaunya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan yang juga diiringi dengan jumlah devisa yang diterima Indonesia melalui sektor pariwisata tahun dari tahun 2004 hingga 2014.

Keywords : *Pemerintah Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kerjasama Bilateral, MoU (Nota Kesepahaman), Pariwisata (Tourism), Turki, Indonesia.*

Negara Republik Turki merupakan sebuah negara besar yang terletak di kawasan *Eurasia* yang teritoritinya terletak di antara daratan Eropa dan Asia, luas wilayahnya yang terbentang dari Anatolia di kawasan Asia Barat hingga ke Balkan di Eropa Tenggara sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Turki memiliki ibukota negara yaitu Ankara, namun kota terbesar di Turki adalah Istanbul (bagian Eropa) disebabkan letak Istanbul yang membentang diantara persilangan benua Asia dan Eropa sehingga adaptasi budaya dari negara ini mengalami asimilasi antara budaya timur (Asia) dan barat (Eropa). Akibat dari percampuran ini menjadikan Turki disebut sebagai negara jembatan budaya antara Asia dan Eropa yang notabeneanya memiliki kultur yang berbeda.

Kota Istanbul merupakan pusat perkembangan kebudayaan yang ada di Turki sejak dahulu kala sehingga melahirkan perpaduan bermacam-macam budaya yang dibawa oleh bangsa Turki Usmani yang banyak mengambil ajaran etika, tata krama dan politik pada bangsa-bangsa lain (Amin 1997). Sejarah bangsa Turki sering berasimilasi dan melakukan hubungan dengan bangsa lain, misalnya dalam bidang pemerintahan dan militer yang berpedoman pada kebudayaan Byzantium, sedangkan dalam ilmu keagamaan, prinsip ekonomi, sains, prinsip kemasyarakatan, dan hukum mengadopsi dari bangsa Arab. Dengan adanya percampuran dan penyerapan budaya yang berbeda-beda oleh Turki ini kemudian melahirkan harmoni baru dengan ciri khas dan keunikan tersendiri dalam elemen budaya yang ada di negara Turki.

Republik Indonesia sendiri merupakan negara demokratis yang telah lama menjalin hubungan dengan Turki sejak abad 18 - an, hal ini ditandai dengan adanya interaksi perdagangan kala itu. Meskipun hubungan itu dianggap belum menyentuh pada tahap yang optimal terhadap pelibatan kedua negara tersebut. Kemudian Indonesia dan Turki terus memperluas lingkup kerjasama bilateral dalam berbagai bidang seperti militer, industri, pariwisata dan lain sebagainya. Kerjasama yang dijalin menunjukkan kurva yang positif, diindikasikan oleh mitra serta kerjasama yang terjalin dengan baik, salah satunya adalah penandatanganan deklarasi "*Indonesia-Turkey: Towards an Enhanced Partnership in a New World Setting*" pada 5 April 2011 di Jakarta. Dan pada bidang perdagangan, Turki adalah mitra dagang Indonesia ketujuh terbesar dari Eropa dengan total perdagangan tahun 2014 mencapai 2,47 miliar dolar AS dengan surplus bagi Indonesia 415 juta dolar AS (JurnalAsia 2015).

Wilayah Republik Indonesia yang terbentang sekitar 13.487 pulau dan jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa (Statistik, Sensus Penduduk 2010), menjadikan pariwisata Indonesia memiliki potensi berskala internasional. Potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan dan menjadi spot bagi pemerintah untuk mempromosikan

pariwisata Indonesia ke dunia dan mendapatkan keuntungan dari kerjasama pariwisata dengan negara Turki.

Kerjasama dalam bidang pariwisata antara Republik Indonesia dan Republik Turki yang telah ditandatangani dalam memorandum saling pengertian pada 6 Oktober 1993 (KEMENLU 2015), menjadi proyek sekaligus bantuan besar bagi Indonesia dalam kiprah pariwisata dalam maupun luar negeri. Kondisi kerjasama pariwisata antar kedua negara ini terus membaik. Indikasinya yaitu peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk berkunjung di kedua negara tersebut dan melalui berbagai pagelaran pengiriman misi budaya sebagai ajang promosi bagi kedua negara tersebut. Kerjasama pariwisata yang telah terjalin sampai dengan saat ini membuktikan bahwa potensi yang ada dapat terus dikembangkan dan menjadi keuntungan yang maksimal bagi kedua negara ini.

Republik Turki yang notabene memiliki keunggulan dari segi posisi yang strategis ini membuka sebuah akses baru dalam pasar global khususnya sektor pariwisata. Adanya kemudahan akses untuk berwisata ke Turki memperlihatkan kunjungan para wisatawan mancanegara Eropa maupun Asia untuk berwisata ke Turki, letaknya yang mudah dijangkau, bahkan dengan biaya yang tidak begitu mahal namun berkelas dunia yang ditawarkan oleh Turki. Pada 2010, kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Turki mencapai 80 juta orang (6 kali lipat dari kunjungan wisatawan ke Indonesia), terutama wisatawan asal Inggris, Jerman dan Belanda. Besarnya jumlah wisatawan yang mengunjungi Turki ditambah dengan kurang lebih 70 juta jiwa penduduknya (Furqan 2010). Potensi wisata serta berbagai macam kebudayaan yang dimilikinya merupakan peluang dalam pasar global yang bernilai devisa cukup tinggi bagi Turki dan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjadikan partner kerjasama bilateral bidang pariwisata yang baik.

Kemudian pada tahun dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Indonesia, efek positif yang ditimbulkan muncul dari sektor pariwisata Indonesia yang terus meningkat bahkan di tengah ekonomi global sedang melambat. Kinerja Kementerian Pariwisata dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan hasil positif, yaitu jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia terus meningkat secara signifikan setiap tahun, rata-rata sebanyak 622.342 wisman dari tahun 2009 hingga 2014 (Statistik, Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia per Bulan Menurut Pintu Masuk 2015). Ditinjau dari hasil dan prospek yang baik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih punya potensi untuk berkembang dan diharapkan memberi kontribusi lebih besar lagi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui kerjasama pariwisata dengan Turki, membawa angin segar bagi Indonesia yang dapat mempelajari kelola sektor pariwisata Turki. Begitu juga Turki yang memiliki partner bilateral yang notabene memiliki kesamaan kultur, agama yaitu Indonesia.

Oleh karena itu, asas resiprositas yang baik sudah seharusnya diciptakan dalam kerjasama pariwisata Indonesia dan Turki. Dengan demikian kedua negara yang telah menyetujui kerjasama pariwisata ini dapat bersinergi dalam mencapai kepentingan nasional masing masing negara, terutama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata nasional melalui kerjasama pariwisata dengan Turki.

Kondisi Pariwisata Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 bab 1 pasal 1 bagian ketentuan umum menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pada kenyataannya pariwisata Indonesia memang memiliki pesona dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik pada umumnya dan wisatawan mancanegara pada khususnya. Keistimewaan alam Indonesia pada setiap sudutnya selalu menjadi hal yang dirindukan, belum lagi aneka ragam budaya di dalamnya yang menambah harmonisasi keindahan akan sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu Indonesia tidak pernah sepi oleh para pelancong mancanegara yang ingin secara langsung menikmati pariwisata di Indonesia.

Oleh sebabnya pariwisata Indonesia memiliki peran penting terhadap negara, salah satunya bidang ekonomi. Pariwisata di Indonesia yang merupakan salah satu industri sekaligus pembantu perekonomian Indonesia dan merupakan program ekonomi kreatif negara. Kemampuan sektor pariwisata di Indonesia dalam menghasilkan devisa telah memposisikan pariwisata sebagai komoditi ekspor yang penting di samping migas. Seperti tragedi yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003. Meskipun telah mengalami tragedi Bom Bali di Kuta pada tahun 2002 silam, namun nilai devisa pasca tragedi tersebut masih tinggi yaitu sebesar 4,496 milyar dolar dan pada tahun 2003 sebesar 4.037 milyar dolar (Prof. Dr. I Gede Pitana M.Si. 2005).

Keunggulan pariwisata Indonesia membawa keuntungan tersendiri bangsa ini. Pariwisata Indonesia mendapatkan banyak kategori penghargaan dunia dari PBB belum lama ini yaitu kategori *Innovation Enterprises*, kategori *Coral Reef Reborn in Pemuteran Bali* dan kategori *Innovation Public Policy and Government* (Ibo 2016). Keunggulan wisata Indonesia merupakan salah satu anugrah Tuhan yang tiada tara, kondisi alam yang nan elok menghasilkan berbagai macam objek serta budaya yang beragam di Indonesia. Hal tersebut tentu akan menjadi potensi Indonesia sebagai destinasi wisata yang berskala internasional.

Kebijakan Pariwisata Indonesia

Setelah Perang Dunia Kedua kegiatan pariwisata internasional tumbuh pesat karena ekonomi dunia mulai membaik. Keamanan terjamin dan teknologi angkutan yang semakin maju (Kaelany 1997).

Pariwisata merupakan sektor ekonomi/budaya yang sangat cepat berkembang. Tidak hanya bagi negara yang baru berkembang, tetapi juga negara maju (Kaelany 1997). Karenanya Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan segala potensi wisata yang dimiliki mulai menjajakan kaki untuk lebih serius dalam menanggapi peluang dari sektor pariwisata ini.

Kebijakan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang – Undang tentang Pariwisata Indonesia nomor 10 tahun 2009. Di dalam Undang – Undang tersebut telah dijabarkan mengenai pengembangan dan pembinaan tentang peningkatan pariwisata Indonesia baik nasional maupun internasional.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yang penulis gunakan bertujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan dan gambaran secara sistematis dan akurat terkait fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang dianalisa. Sedangkan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung. Seperti halnya dokumen ataupun literatur yang relevan terkait dengan rumusan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang sumbernya berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan media, serta artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menganalisa permasalahan secara induktif. Teknik induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dalam keadaan umum dan tema-tema yang dominan. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis mengumpulkan data-data yang umum dan tema-tema yang bersifat dominan dari telaah pustaka dokumen, dan literatur yang terkait. Kemudian diinterpretasikan menjadi pola-pola hubungan dan keterkaitan konsep atau fenomena satu dengan yang lainnya. Lalu dideskripsikan melalui penggambaran dari umum ke khusus.

Program Pengembangan Industri Pariwisata Indonesia

Pembangunan Industri pariwisata ini menjadi bahan pembahasan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011.

Ke lima kebijakan yang disebutkan diatas menjelaskan bahwa pembangunan industri harus bersinergi dengan pembangunan aspek lainnya. Di dalamnya juga terdapat partisipasi rakyat dalam pembangunan industri pariwisata. Artinya adalah

perlu adanya keseimbangan antara peran pemerintah maupun peran rakyat dalam pembangunan industri pariwisata.

Kemudian program pembangunan industri pariwisata Indonesia juga dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disingkat RPJMN, tahun 2004 – 2009. Terdapat penjelasan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Arah kebijakan pengembangan pariwisata dalam 5 (lima) tahun ke depan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya:

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan serta mendorong investasi.

Kemudian mengenai visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam bab II pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Mendasarkan kepada segenap prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diatas, Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 juga telah mengarahkan bahwa tujuan kepariwisataan Indonesia.

Selanjutnya dalam penyusunan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) sebagai langkah lanjut dari mandat kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diberikan oleh Undang - Undang nomor 10 tahun 2009 kepada pemerintah telah berhasil diselesaikan oleh Pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 (Drs. Bambang Sunaryo 2013).

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pemasaran digunakan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung wisata ke Indonesia dan juga memberikan kesan baik serta meberikan citra dalam memasarkan pariwisata Indonesia. Didalam undang undang telah dijelaskan bahwasanya pemasaran pariwisata sangat penting mengingat mempengaruhi

banyak atau tidaknya devisa melalui kunjungan wisatawan yang akan diterima ditentukan juga oleh usaha pemasaran.

Strategi Pemasaran yang dijabarkan dalam Undang-Undang Pariwisata Indonesia nomor 10 tahun 2009 pasal 6 yang berbunyi :

“Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata”.

Kemudian didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ditujukan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan.

Adapun pemasaran pariwisata Indonesia melalui strategi promosi. Promosi pariwisata Indonesia diatur pemerintah dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Promosi dilakukan dengan mengadakan agenda yang menonjolkan pariwisata baik sisi budaya, sejarah dan lainnya yang dimiliki Indonesia

Melalui strategi promosi yang baik Indonesia akan mendapatkan pasar wisatawan mancanegara yang lebih banyak lagi. Seperti contoh strategi promosi dalam agenda *visit Indonesia* dan *wonderful Indonesia*.

Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia mempromosikan diri sebagai tujuan wisata untuk turis-turis asing dengan kampanye "Wonderful Indonesia". Penting bagi Pemerintah untuk berinvestasi dalam kampanye-kampanye promosional sejenis itu untuk menyebarkan citra positif Indonesia karena kebanyakan negara-negara Barat menerima berita-berita headline negatif dari Indonesia , contohnya Islam radikal, bencana alam seperti tsunami dan letusan gunung berapi, menyebabkan citra negatif yang tidak tepat dari negara ini (Indonesia-Investments 2016).

Program Pengembangan Kemitraan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 menyebutkan dalam rangka pencapaian tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan perkuatan jaringan *database* dan informasi kebudayaan dan kepariwisataan, baik di dalam negeri (antara pusat-propinsi, dan kabupaten/kota) dan luar negeri termasuk pengembangan SDM-nya;

2. Pengembangan Litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk *joint research*, *dual-training* serta aliansi strategis terutama dengan lembaga sejenis di luar negeri;
3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri budaya dan pariwisata dan pelaku sosio-ekonomi lainnya.

Kebijakan yang dipaparkan diatas meliputi pengembangan dan pembinaan serta strategi pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meningkatkan pariwisata nasional dan internasional Indonesia.

Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Turki Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Hubungan bilateral Indonesia dengan Turki di era Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono terhitung baik seperti yang telah dilakukan oleh Presiden - Presiden Indonesia sebelumnya. Jalinan berbagai kerjasama antar kedua negara yang telah berlangsung lama menjadi semakin mempererat hubungan kedua negara. Kerjasama yang dijalin meliputi berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga di bidang militer. Hubungan baik kedua negara ini pun diselimuti oleh berbagai kepentingan yang menimbulkan dinamika dalam keberlangsungan hubungan kedua negara.

Hubungan antara Indonesia dengan Turki terbilang sangatlah erat. Seperti pepatah jauh di mata dekat dihati. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua bangsa ini menjadikan hubungan kerjasama bilateral memiliki emosional persaudaraan. Mulai dari sistem negara nya hingga kondisi sosial masyarakatnya yang sama antar kedua negara.

Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Turki

Secara historis, awal mula hubungan Indonesia dengan Turki dimulai sejak abad ke 12. Saat itu pelajar Turki yang mengunjungi Indonesia membawa misi penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Pelajar Turki membawa dan menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara berdakwah di wilayah Indonesia yang bermula dari wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (Ministry of Foreign Affairs n.d.).

Sejarah pun telah membuktikan bahwa hubungan kedua negara sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke 16. pada saat itu Turki dibawah kepemimpinan Utsmaniyah mengadakan ekspedisi ke Indonesia tepatnya ke wilayah Aceh. Alasan kaum *Utsmaniyah* mengadakan ekspedisi tersebut adalah untuk merespon permintaan dan membantu Kesultanan Aceh dalam konflik dengan penjajah Portugis di wilayah Malaka (Ministry of Foreign Affairs n.d.). Dimana pada saat itu, Aceh yang merupakan salah satu provinsi Republik Indonesia di era modern, adalah negeri Imperium Utsmani di wialayah Asia Timur. Kemudian hal ini juga diekspresikan dengan kemiripan bendera kerajaan Aceh tempo dulu dengan bendera Turki Utsmani, yaitu berlatar belakang Bulan Sabit (Baddal 2015).

Kemudian pengakuan secara kedaulatan antar kedua negara yang menjadikan hubungan bilateral menjadi formal dan intens sesuai dengan undang – undang serta peraturan yang ada di dunia internasional. Negara Indonesia mengakui kedaulatan negara Republik Turki pada saat negara Turki memproklamasikan kemerdekaan bulan Oktober tahun 1923. Kemudian negara Turki mengakui Indonesia pada 29 Desember 1949 dan hubungan diplomatik telah dibangun pada 1950. Dan 8 (delapan) tahun kemudian, Kedutaan besar Turki di Jakarta telah dibuka pada tanggal 10 April 1957 (Ministry of Foreign Affairs n.d.).

Dalam pengakuan ikatan berkembang sejak tahun 2004, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan kemitraan strategis pada bulan April 2011 ketika Presiden ke-11 dari Turki , Abdullah Gül mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Presiden ke-6 dari Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Selama kunjungan mereka menandatangani deklarasi bersama yaitu Turki dan Indonesia : Menuju Kemitraan Ditingkatkan dalam pengaturan New World, yang tetap menjadi dasar yang kuat dari hubungan bilateral hingga saat ini (Ministry of Foreign Affairs n.d.).

Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Turki

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki ini telah dimulai sejak tahun 1957. Hal tersebut ditandai dengan dibangun dan dibukanya kantor kedaulatan Republik Turki di Indonesia pada 10 April pada tahun tersebut (Ministry of Foreign Affairs n.d.). Kantor Kedutaan Turki tersebut dibangun dengan tujuan untuk menangani permasalahan yang mencakup urusan administratif antara negara Turki dan Indonesia. Namun sebelumnya hubungan negara Indonesia dengan negara Turki telah terjalin pada 29 Desember 1949 dimana waktu itu Turki mengakui secara *de jure* atas kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ketertundaan hubungan bilateral kedua negara tersebut dikarenakan situasi politik di kedua negara yang sedang kurang kondusif.

Namun dalam perjalanannya, hubungan diplomasi antara Indonesia dan Turki tidak selamanya berjalan mulus. Terdapat dinamika dalam hubungan kedua negara, salah satunya ditandai dengan tidak adanya kunjungan kenegaraan antara Indonesia dan Turki sejak tahun 1985. Hal ini dikarenakan fokus masing-masing negara yang berbeda saat itu. Indonesia lebih memfokuskan pada hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan Turki lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan Eropa sehubungan dengan keinginannya untuk bergabung dengan Eropa dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara di lingkup kawasan regionalnya.

Secara perkembangannya, hubungan bilateral antara negara Turki dengan Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin meningkat. Hubungan yang dijalin diantara kedua negara merambah hingga sektor perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan Hubungan bilateral Republik

Indonesia dan Turki dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Pada tahun 2005, volume perdagangan kedua negara senilai hampir 635 juta dolar AS. Pada tahun 2008, jumlah itu meningkat menjadi sekitar 1,3 miliar dolar AS dengan surplus ada pada Indonesia. Perinciannya, ekspor Indonesia sebesar 678 juta dolar, sedangkan impor sekitar 587 juta dolar AS (Malau 2010).

Diplomasi Budaya Indonesia Di Turki

Sistem kebijakan luar negeri Indonesia mengenal diplomasi kebudayaan bukan sebagai sebuah cabang ilmu diplomasi yang masih sangat baru, akan tetapi media kerjasama ini telah berkembang dengan memanfaatkan transformasi nilai – nilai kebudayaan yang ada. Sebelumnya model kerjasama seperti ini hanya dibatasi dalam pengertian alat untuk mengelolah hubungan antar bangsa dan menganggap kebudayaan hanya pada sebatas kesenian (bersifat mikro). Namun seiring dengan adanya perkembangan dalam tatanan hubungan antar negara maka diplomasi kebudayaan pun kini mengalami asimilasi sehingga bersifat makro yang menganggap bahwa esensi kebudayaan dalam gaya berdiplomasi semakin luas samapai dengan nilai – nilai ideologi, nasionalisme ataupun globalisasi.

Transformasi politik pemerintahan yang pernah melanda republik Indonesia dari corak sistem pemerintahan otoriter sejak tahun 1998 kini menjadi tanggungjawab negara untuk menekankan politik pencitraan sebagai suatu basis kekuatan untuk melakukan diplomasi Internasional. Sebagai negara bekas rezim otoriter Indonesia pun kini memiliki agenda strategis untuk memperoleh pengakuan sebagai negara dengan sosok baru yang lebih demokratis di mata internasional sehingga dapat diterima dalam pergaulan dunia. Misalnya saja politik pencitraan yang dilakukan Indonesia sebagai langkah strategis untuk memberikan kepercayaan dan *image* positif terhadap salah satu negara mitra kerjasama yaitu Republik Turki.

Diplomasi kebudayaan nasional yang dilakukan Indonesia dewasa ini memerlukan manajemen modern dengan melibatkan partisipasi aktif dan menyeluruh dari kalangan masyarakat. Peran diplomasi kebudayaan bagi Indonesia disinyalir bahwa diplomasi media ini tidak kalah pentingnya dengan operasi militer, bahkan dalam kondisi seperti saat sekarang ini di tengah kebijakan *soft power*, maka diplomasi kebudayaan sangat penting dalam membina hubungan antar negara. Diplomasi kebudayaan yang digencarkan Indonesia pada tahun ini dinilai semakin aktif karena diplomasi kebudayaan akan berdampak langsung terhadap pengaruh sosial dan ekonomi yang dapat bersifat jangka panjang.

Sebagai salah satu institusi negara yang berperan sekaligus bertanggungjawab menanangani bidang *public relation* antar negara – negara di dunia, Departemen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memegang peran penting dalam alur sistemik diplomasi kebudayaan. Institusi yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia bersatu, aman, adil, demokratis dan sejahtera untuk meningkatkan citra Indonesia di masyarakat Internasional melalui pengoptimalan peran informasi. Selain

itu upaya yang dilakukan sebagai salah satu sasaran kebijakan dari kemenlu adalah mengoptimalkan diplomasi sosial budaya dan diplomasi kemanusiaan, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam rangka pelaksanaan diplomasi total, melaksanakan diplomasi publik dalam implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia (Kemenlu n.d.).

Mengetahui akan pentingnya peran serta elemen masyarakat (*civil society*) serta aktor non – pemerintah (*non-state actors*) dalam level hubungan diplomasi publik maka kebijakan dari kementerian luar negeri akhirnya memutuskan untuk membentuk Direktorat Diplomasi Publik. Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri RI pertama kali dibentuk berdasarkan surat keputusan menteri luar negeri RI nomor 053/OT/II/2002/01, tanggal 1 Februari 2002 tentang organisasi dan tata kerja departemen luar negeri. Pada tahun 2005 organisasi dan tata kerja departemen luar negeri diperbaharui berdasarkan peraturan menteri luar negeri No. 02/A/OT/VIII/2005/01 tahun 2005, tanggal 19 Agustus 2005 (Kemenlu n.d.).

Sayangnya bahwa aplikasi akan kegiatan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Turki sendiri, saat ini dinilai masih sangat minim. Baik dari institusi terkait seperti halnya kementerian luar negeri pada umumnya dalam menjalankan diplomasi publik. Hubungan interaksi dalam esensi kebudayaan ke negara Turki terlebih masih didominasi oleh aktivitas dari masyarakat sipil terutama dari kalangan akademisi dan wisatawan. Meskipun aktivitas yang telah dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai diplomasi budaya, kegiatan tersebut kurang terkoordinasi, misalnya ke media massa ataupun Kedutaan Besar Indonesia di Ankara sehingga mereka yang melakukan diplomasi publik tidak terekspos dan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia.

Perkembangan Kerjasama Pariwisata Indonesia Dan Turki Di Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pembangunan pariwisata memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh, pemerintah pada semua level terlibat dalam mempersiapkan infrastruktur, penggunaan tanah atau tata ruang, dan sebagainya. Untuk tercapainya sebuah perencanaan yang sistematis diperlukan sebuah proses perencanaan strategis (*the strategic planning process*). Menurut Richardson & Fluker (Fluker 2004).

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi, dimana pada awalnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang, namun kini bahkan telah menjadi hak asasi seseorang sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt bahwa *where once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right* (Naisbitt 1994). Negara Indonesia yang dikenal sebagai negeri 1001 pulau, merupakan sebuah julukan yang menggambarkan bagaimana karakteristik Indonesia dari segi geografisnya. Secara mutlak bahwa wilayah Indonesia yang membentang sejauh 3.977 mil dari wilayah Pulau Sumatera hingga ke dataran Papua

memperlihatkan pula nilai dari aset - aset yang dimiliki oleh negara ini. Hal ini juga tidak terlepas dari kekayaan kultur dan budaya yang dimiliki hingga tersebar di seluruh bagian pelosok nusantara (Wisata Indonesia 2011).

Negara Indonesia sebagai salah satu daerah kunjungan wisata Asia memang memiliki segudang potensi dan nilai lebih dalam sektor kepariwisataan. Secara strategis yang terletak di garis khatulistiwa sekaligus menempatkan corak iklim yang ideal untuk aktivitas pariwisata. Keragaman budaya, kesenian, benda peninggalan sejarah, suku adat, bahasa maupun kekhasan kuliner masing – masing etnik juga menjadi elemen pendukung sebagai daya tarik para wisatawan, khususnya pelancong dari negara lain. Hal ini yang kemudian menyingkapkan bagaimana perubahan sekaligus perkembangan sektor kepariwisataan di Indonesia hingga 6 % di atas pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya mencapai 4% (organisasi Pariwisata Dunia PBB (UN-WTO) 2011), indeks pertumbuhan pemasukan jumlah devisa per 2010 mencapai US\$ 7 Miliar melebihi target pendapatan semula senilai US\$ 6,5 Milliar (news 2010). Sehingga turut mendorong upaya peningkatan hubungan sektor pariwisata antara Indonesia dan Turki.

Tabel kedatangan wisatawan mancanegara masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Negara Asal	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Amerika Total	209 779	209 511	184 525	220 202	239 678	229 824
Eropa Total	720 706	798 408	730 398	796 730	924 745	978 369
Afrika	35 507	27 450	22 655	27 777	29 753	28 375
Timur Tengah	35 783	60 601	55 033	55 348	67 271	122 069
Asean Total	2 431 154	2 174 006	2 328 345	2 490 076	2 794 607	2 772 684
Asia Pasifik Total	1 888 236	1 732 125	1 550 395	1 915 626	2 178 443	2 192 409
Total Keseluruhan	5 321 165	5 002 101	4 871 351	5 505 759	6 234 497	6 323 730

Negara Asal	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Amerika Total	229 824	258 584	297 061	312 209	333 150	358 707
Eropa Total	978 369	1 038 420	1 045 865	1 108 521	1 243 005	1 332 593
Afrika	28 375	27 200	31 640	41 583	51 298	56 503
Timur Tengah	122 069	144 661	175 885	148 788	188 676	195 518
Asean Total	2 772 684	3 052 285	3 284 664	3 375 291	3 581 420	3 751 074
Asia Pasifik Total	2 192 409	2 481 794	2 814 616	3 058 070	3 404 580	3 741 016
Total Keseluruhan	6 323 730	7 002 944	7 649 731	8 044 462	8 802 129	9 435 411

Tabel penerimaan devisa Indonesia melalui wisatawan mancanegara di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Tahun	Devisa Wisman (Juta US\$)
2004	4,797.88
2005	4,521.90
2006	4,447.98
2007	5,345.98
2008	7,347.60
2009	6,297.99
2010	7,603.45
2011	8,554.39
2012	9,120.89
2013	10,054.15
2014	11,166.13

Sumber : Badan Pusat Statistik (Statistik, Jumlah Wisatawan Asing Tahun 1974 - 2014, Devisa Wisman 1998-2014 2016)

Jumlah devisa yang dihasilkan melalui wisatawan mancanegara yang berkunjung Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat. Kenaikkan tersebut tidak semata tanpa alasan, namun kenaikan jumlah tersebut merupakan dampak dari strategi *soft diplomacy* melalui diplomasi budaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kerjasama di sektor pariwisata dengan Turki

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Indonesia Di Bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Kerjasama Pariwisata Dengan Turki

Hubungan kerjasama negara Indonesia dengan negara Turki yang kita ketahui sudah berlangsung sangat lama ini menghasilkan kedekatan antara kedua negara. Indonesia dan Turki menjadi salah satu kontributor dalam kemajuan ajaran agama Islam di dunia. Kedua negara ini turut mengambil andil dalam prospek kemajuan agama Islam dalam berbagai aspek serta aspek budaya yang menjadikannya negara dengan nilai sejarah tinggi.

Dukungan Internasional pasca reformasi juga merupakan faktor penting lainnya dalam memperkuat legitimasi Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan terhadap rezim pemerintahan yang baru kepada Pemerintahan Turki. Politik pencitraan melalui kebudayaan ini Pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa upaya teknis untuk meyakinkan sekaligus bisa menghilangkan stigma negatif yang pernah melekat seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Metode ini dianggap sebagai cara yang tepat demi menggapai kepentingan nasional Indonesia.

Mengenai bentuk strategi yang general dan penting untuk dilakukan oleh negara negara di dunia yaitu saling *respect* antar negara bangsa. Negara Indonesia dengan negara Turki memiliki tingkat saling *respect* yang tinggi satu sama lain. Hal tersebut dipraktekan dengan dilakukanya kunjungan kenegaraan oleh kedua pemimpin negara. Kunjungan kepresidenan atau kenegagraan tersebut dilakukan selain untuk menjaga keharmonisan hubungan kedua negara, juga digunakan sebagai forum bagi kedua pemimpin negara untuk membahass setiap kerjasama yang telah disepakati serta mengenai prospeknya. Hal ini yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengunjungi negara Turki dalam rangka kunjungan kepresidenan. Kunjungan kepresidenan tersebut merupakan pertama kalinya semenjak terakhir kali setelah 25 tahun silam (Kusumaputra 2010). Di dalam kunjungan kepresiden tersebut menjadikan pertemuan yang mempererat hubungan kedua negara sekaligus menjadi forum internasional dan juga memperbincangkan mengenai tindak lanjutan dari beberapa *MoU* (Nota Kesepahaman) yang telah disepakati dan ditandatangani kedua negara dan termasuk *MoU* kerjasama bidang pariwisata di dalamnya (Bambang 2010).

Melalui strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut, hubungan bilateral Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Turki sangat baik. Hal ini ditandai dengan respon positif Pemerintah Turki yang *respect* kepada Indonesia. Berbagai kesempatan untuk berkoalisi dalam berbagai forum internasional menambah intensitas kedekatan kedua negara ini. Belum lagi kesamaan kondisi budaya dalam negeri yang beragam serta agama yang menjadikan alasan mengapa hubungan kedua negara ini semakin kuat seiring berjalan waktu.

Upaya Diplomasi Budaya Pemerintah Indonesia Dalam Kerjasama Pariwisata Dengan Turki

Dalam ilmu hubungan internasional, Diplomasi Kebudayaan merupakan sistem pelaksanaan diplomasi yang menggunakan pendekatan kebudayaan sebagai sarana bantu untuk mencapai sasaran dan tujuan, baik dalam bidang diplomasi dengan misi khusus. Diplomasi Kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi ataupun militer (Kartikasari 2007).

Eksebisi Sebagai Ajang Promosi Kebudayaan Yang Diadakan Oleh Indonesia Di Turki

Eksebisi atau pameran dapat dilakukan untuk menampilkan konsep – konsep atau karya kesenian dan ilmu pengetahuan. Bentuk dari eksebisi ini merupakan

bentuk diplomasi kebudayaan yang paling konvensional mengingat gaya diplomasi yang modern adalah gaya diplomasi yang bersifat terbuka (Kartikasari 2007).

Eksepsi budaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Turki bertujuan untuk memamerkan budaya kedua negara agar saling mengenali kebudayaan yang khas dan unik dari kedua negara. Salah satu bentuk diplomasi ini digunakan sebagai metode utama untuk langsung memperkenalkan budayanya oleh kedua negara.

Program pameran atau eksepsi yang diadakan untuk melangsungkan kegiatan pertukaran budaya antar negara dilakukan untuk menarik perhatian wisatawan kedua negara maupun negara lain untuk berkunjung dan menikmati keberagaman budaya kedua negara. Pada setiap event yang digelar oleh kedua negara memiliki misi, selain untuk mempererat kerjasama bilateral bidang pariwisata, namun juga untuk dijadikan ajang promosi budaya kedua negara secara langsung. Dengan cara mengadakan promosi budaya yang dimiliki Indonesia dalam pertukaran budaya dengan Turki dapat dijadikan peningkatan kerjasama dan meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan dari Turki maupun negara lain ke Indonesia (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara 2013).

Melalui eksepsi budaya ini, Indonesia dapat memaksimalkan kekayaan ragam budaya nasional yang dimiliki untuk dipromosikan ke negara Turki. Program pertukaran budaya Indonesia pun disambut hangat di negara Turki. Terlihat antusias masyarakat Turki terhadap budaya yang dimiliki Indonesia di setiap event pertukaran budaya yang diadakan di Turki.

Pemerintah Indonesia yakin bahwa potensi alam wisata dan ragam budaya yang dimiliki Tanah Air dapat diterima masyarakat internasional dan menjadi perhatian dunia Internasional. Hal tersebut dibuktikan oleh Pemerintah Indonesia yang menggandeng Pemerintah Turki dalam kerjasama kebudayaan. Dalam upaya meningkatkan hubungan kerjasama budaya ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Turki menandatangani persetujuan kerjasama pertukaran program kebudayaan untuk tahun 2010 – 2012 (K. L. Indonesia n.d.).

Propaganda Sebagai Promosi Kebudayaan Indonesia

Propaganda mirip dengan eksepsi, propaganda disini bukan dalam artian negatif yang mengacu pada sebuah konflik melainkan merupakan penyebaran informasi baik mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun nilai sosial ideologis suatu bangsa kepada bangsa lainnya. Hanya saja tidak diampaikan secara langsung (biasanya melalui berbagai media terutama elektronik) dan secara awam berkonotasi negatif, bahkan juga sering dianggap subversif (Kartikasari 2007).

Strategi diplomasi kebudayaan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kerjasama dengan Turki di bidang pariwisata juga dilakukan melalui berbagai media seperti koran dan media

elektronik lainnya seperti televisi, radio dan internet. Hal ini diperlukan sebagai alat bantu dalam menyampaikan kebudayaan khas kedua negara kepada seluruh masyarakat kedua negara tersebut atau bahkan dunia internasional.

Peropaganda yang dilakukan oleh Indonesia dalam memperkenalkan kebudayaan Indonesia dilakukan melalui media. Salah satunya melalui media cetak seperti koran dan majalah. Diketahui pada setiap pagelaran atau promosi kebudayaan Indonesia yang dilakukan di negeri 2 benua tersebut diliput oleh media nasional Turki. Hal ini dibuktikan dengan beberapa arsip yang menyimpan berita acara eksebisasi kebudayaan Indonesia di Turki.

Kompetisi Indonesia dan Turki

Dalam pengertian paling umum, kompetisi merupakan pertandingan atau persaingan. Dalam konteks ini pertandingan adalah dalam arti positif, misalnya olahraga, kontes kecantikan, atau kompetisi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya (Kartikasari 2007).

Kerjasama Sektor Lain Untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata Indonesia

Kerjasama yang dibangun oleh Indonesia dalam bidang pariwisata oleh negara Turki memiliki misi meningkatkan sektor pariwisata nasional Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam misi tersebut terdapat faktor lain yang mendukung kerjasama tersebut.

Bebas Visa Diplomatik Dan Pemberlakuan *Visa On Arrival* (Voa) Yang Disepakati Oleh Indonesia Dan Turki

Hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dengan Republik Turki dalam misi meningkatkan sektor pariwisata bagi kedua negara melahirkan kebijakan lain yang relevan terhadap misi peningkatan pariwisata tersebut. Kebijakan yang mendukung tersebut dianggap sangat penting demi melancarkan kepentingan dalam kerjasama bidang pariwisata. Dalam hal ini kerjasama lain yang mendukung kegiatan pariwisata internasional Indonesia maupun Turki adalah persetujuan *Visa on Arrival* (VoA) untuk kunjungan antar negara ini dibuat guna memudahkan wisatawan yang memutuskan untuk berwisata dari maupun ke Indonesia dan Turki.

Pelayanan konsuleran mengenai pemegang bebas visa diplomatik dan dinas Indonesia antara Turki yang diberlakukan sejak 18 Agustus 2004 dengan masa berlaku visa selama 14 hari. Di tahun 2011, Indonesia dan Turki kembali menyepakati bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dari kedua negara. Pemberlakuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik kedua negara ditingkatkan menjadi 30 hari namun tidak dapat melebihi 90 hari. Kesepakatan ini diandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dan Mehmet Aydin, Menteri Negara Turki (M. L. Indonesia 2011).

Jalur Transportasi Darat Dan Laut Indonesia Ke Turki

Dalam Ilmu Hubungan Internasional dijelaskan bahwa materi dari diplomasi kebudayaan adalah segala hal secara makro maupun mikro yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya dalam konteks politik luar negeri, antara lain adalah teknologi (Kartikasari 2007). Dalam kerjasama yang menggunakan teknologi transportasi ini, Indonesia dan Turki memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah akses dari kedua negara tersebut.

Kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Turki dalam bidang pariwisata ini tidak terlepas dari kebutuhan lain yang menunjang kegiatan pariwisata antar kedua negara. Misi untuk meningkatkan produktifitas dalam negeri khususnya melalui bidang pariwisata ini dibutuhkan strategi yang apik. Adalah alat transportasi sebagai sarana penunjang kegiatan wisata tersebut. Alat transportasi seakan menjadi kebutuhan utama para wisatawan.

Kerjasama bidang pariwisata yang dibangun merambah kepada kerjasama di bidang transportasi setelah Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Freddy Numberi bersama Menteri Perhubungan dan Komunikasi Turki Binali Yildirim menandatangani kerjasama bidang transportasi laut (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Maritime Transport*).

Tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam melakukan misi diplomasi budaya terhadap Turki secara umum adalah penyesuaian diri untuk bermitra dengan salah satu negara maju di kancah internasional saat sekarang ini. Turki yang unggul pada beberapa sektor sebut saja Ekonomi, Pendidikan, Industri dan Pariwisata mengindikasikan bahwa upaya diplomasi budaya Indonesia dalam hal ini tidak akan mudah, sebab jika Indonesia memiliki target untuk pencapaian melebihi pada sektor – sektor disebutkan maka paling tidak perlu memerlukan waktu untuk beberapa dasawarsa. Oleh karena itu yang dituntut dari permainan ini adalah strategi dan pola Pemerintah Indonesia didalam memainkan segenap instrumen dan peran dalam upaya diplomasi tersebut.

KESIMPULAN

Hubungan kerjasama bilateral bidang pariwisata anantara Indonesia dengan Turki telah dimulai sejak penandatanganan *MoU* (Nota Kesepahaman) oleh kedua negara pada tanggal 6 Oktober 1993. Kerjasama tersebut diperpanjang hingga tahun Susilo Bambang Ydhoyono menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Di dalam kerjasama di bidang pariwisata tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki strategi yaitu dengan cara Diplomasi Kebudayaan. Strategi tersebut dilakukan demi mendulang prestasi pada sektor pariwisata seperti negara rival bilateral kerjasama yaitu negara Turki. Strategi Pemerintah Indonesia meliputi :

Program beberapa eksepsi ragam budaya yang diadakan di Turki. Melalui beberapa event yang diadakan oleh pemerintah Indonesia tersebut menjadi upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada Turki. Bentuk strategi ini bertujuan untuk mempromosikan keberagaman budaya khas Indonesia kepada negara Turki yang dapat berdampak positif pada sektor pariwisata Indonesia.

Propaganda melalui media yang dilakukan untuk menambah daya promosi hingga ke seluruh kalangan masyarakat Turki maupun Internasional. Pemerintah Indonesia mengupayakan hal tersebut melalui beberapa pengadaan kerjasama dengan media untuk peliputan setiap acara eksepsi budaya yang diadakan di negara 2 benua tersebut. Serta kerjasama dalam penyiaran oleh Pemerintah Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan lembaga regulator penyiaran Turki yaitu Radio Televizion Ust Kuruulu (RUTK).

Bentuk diplomasi budaya lainnya adalah kompetisi. Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh negara Turki. Salah satunya adalah delegasi Indonesia yang dikirim oleh pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan untuk mengikuti International Biology Olympiad (IBO) pada tahun 2007 di Turki dan meraih medali emas pada kompetisi tersebut. Dengan peraih prestasi dalam kompetisi tersebut, Indonesia mendapat pengakuan akan kualitas oleh negara Turki hingga dunia internasional yang salah satunya akan berdampak pada sektor pariwisata Indonesia.

Bentuk strategi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia tersebut telah direspon cukup baik oleh pemerintah Turki. Pada setiap program pertukaran budaya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia juga mendapat apresiasi oleh pemerintah hingga masyarakat umum Turki. Sehingga seiring berjalan waktu reputasi akan kebudayaan yang dimiliki Indonesia terus diakui oleh masyarakat internasional, terkhusus negara rival bilateral Turki. Hal ini tentu berdampak positif bagi Indonesia, terkhusus di bidang pariwisata.

Demi kepentingan dalam menaikkan sektor pariwisata Indonesia, Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa strategi lain yang dituangkan dalam kebijakan pada kerjasama yang dijalin dengan Turki. Strategi tersebut dianggap mendukung dalam peningkatan sektor pariwisata Indonesia.

Kerjasama pemberlakuan visa diplomatik dan *visa on arrival* (VoA) yang disetujui sejak 18 Agustus 2004 dan kembali disetujui oleh Indonesia dan Turki pada 5 April 2011. Kebijakan ini menjadi kemudahan dalam hal birokrasi bagi wisatawan asal Turki untuk berkunjung Indonesia.

Kerjasama dalam pembukaan jalur transportasi dengan Turki juga menjadi bala bantuan dalam misi peningkatan sektor pariwisata nasional Indonesia. Kerjasama

ini telah ditandatangani pada 29 Juni 2010 di Ankara, oleh kedua Presiden. Kerjasama bidang transportasi ini meliputi transportasi udara dan laut. Dengan ini memudahkan wisatawan Turki yang berkunjung dengan menggunakan transportasi yang disediakan seperti *Turkish Airline* yang terbang langsung dari Istanbul ke Jakarta.

Alhasil dengan menjalankan strategi *soft diplomacy* nya tersebut, sektor pariwisata Indonesia mengalami peningkatan melalui jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat secara signifikan di kedua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu tahun 2004 hingga 2014. Peningkatan jumlah kedatangan wisatawan tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah devisa pada tahun tersebut yang diterima melalui wisman yang berkunjung ke Indonesia.